

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT MAKASSAR**

**THE INFLUENCE OF TAXPAYER OBEDIENCE TOWARD THE
ACCEPTANCE OF MOTORCYCLE TAX AT SAMSAT MAKASSAR**

MASITA HAMZAH

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas ekonomi

Universitas Negeri Makassar

Jl. Raya Pendidikan Makassar 90221

Email: Masitahamzah8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar. Variabel dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (X) dan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2014-2016 sebanyak 24 Kabupaten. Berdasarkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 14 kabupaten. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, analisis korelasi *product moment*, dan uji-t.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil analisis data diperoleh model persamaan $Y = 293,214 + 0,077X$, artinya setiap penambahan satu satuan nilai kepatuhan wajib pajak, maka akan menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor bertambah 0,077 satuan. Hasil analisis *product moment* diperoleh nilai koefisien korelasi $r = 0,737$ menunjukkan hubungan kuat antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil analisis uji-t diperoleh nilai signifikan $0,003 < 0,05$, dengan demikian hipotesis dinyatakan diterima.

Kata kunci :Kepatuhan wajib pajak, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This research aimed at knowing the influence of taxpayer obedience toward the acceptance of motorcycle tax at Samsat Makassar. Variables in this research were taxpayer obedience (X) and acceptance of motorcycle tax (Y). The population in this study are all data of the acceptance of motorcycle tax in province of Sulawesi Selatan during the period 2014-2016 as many as 24 districts. Based on sampling technique using purposive sampling method obtained as many as 14 districts. Data collection technique used documentation. Technique data analysis used was simple linear regression analysis, analysis product moment correlation and t-test.

Based on the data analysis result, it was gained equation model of $Y=293,214+0,077X$, meaning that every addition of one unit of taxpayer obedience, thus causing acceptance of motorcycle tax added by 0,077 unit. Product moment analysis result gained correlation coefficient value $r=0,737$ showing strong relation between taxpayer obedience toward the acceptance of motorcycle tax. T-test analysis result gained significant value $0,003<0,05$, thus, the hypothesis was considered accepted.

Key words: Taxpayer Obedience, Acceptance of Motorcycle Tax

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara, salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang

bermanfaat bagi masyarakat luas. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ketentuan umum perpajakan sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki dua fungsi yaitu Fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*cregulerend*), fungsi *budgetair* sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi *cregulerend* sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah, di mana salah satu komponennya yaitu pemungutan pajak daerah.

Pajak daerah terbagi atas dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh badan pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa: "Jenis pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak antara lain: pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok". Dari berbagai jenis pajak diatas salah

satunya pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan dalam membiayai pembangunan daerah provinsi.

Menurut Nurmantu (2005:148) "Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Menurut Samudra (2015:92) "Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor".

Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang memakai kendaraan bermotor, maka bertambah juga penerimaan Negara dari sektor pajak. Menurut Priantara (2012:109) "peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Namun banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kota Makassar belum pasti meningkatkan pendapatan daerah apabila tidak didukung oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama Samsat.

Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(SWDKLLJ). Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota. Dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor, kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang sangat berperan penting. Tentu UPTD SAMSAT yang diharapkan menjadi sarana untuk memaksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berikut adalah data kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kantor UPTD Samsat Wilayah Makassar, Mappanyukki, Pettarani pada Tahun 2013 :

Tabel 1. Data Kepatuhan Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kantor UPTD SAMSAT Makassar pada Tahun 2013

TA	KAB	Kepatuhan wajib pajak				Penerimaan PKB			
		WPYT	WPYM	Tingkat kepatuhan	Kat	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	Kat
2013	Maros	95.931	64.170	67%	Ct	23.820.319.000	24.696.045.050	106,50%	Se
	Bone	145.931	109.336	74%	Ct	10.780.02.000	11.416.421.800	105,89%	Se
	Luwu	80.767	41.613	51%	R	10.780.902.000	11.416.421.800	105,89%	Se
	Sinjai	35.059	37.210	106%	T	8.737.237.000	9.881.634.100	113,09%	Se
	Bantaeng	22.034	18.869	86%	T	5.757.632.000	6.389.571.600	110,97%	Se
	Pinrang	126.049	68.327	54%	R	21.087.459.000	22.157.080.550	105,07%	Se

Sumber : SAMSAT Kota Makassar (data diolah)

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui dari enam Kabupaten terdapat dua Kabupaten penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam kategori tinggi, yaitu Kabupaten Luwu dan Kabupaten Pinrang dengan capaian masing-masing

106,50 persen dan 105,89 persen, tetapi tingkat kepatuhan wajib pajaknya termasuk dalam kategori rendah yaitu di bawah 60 persen. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh**

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Makassar”

METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian dan Desain Penelitian

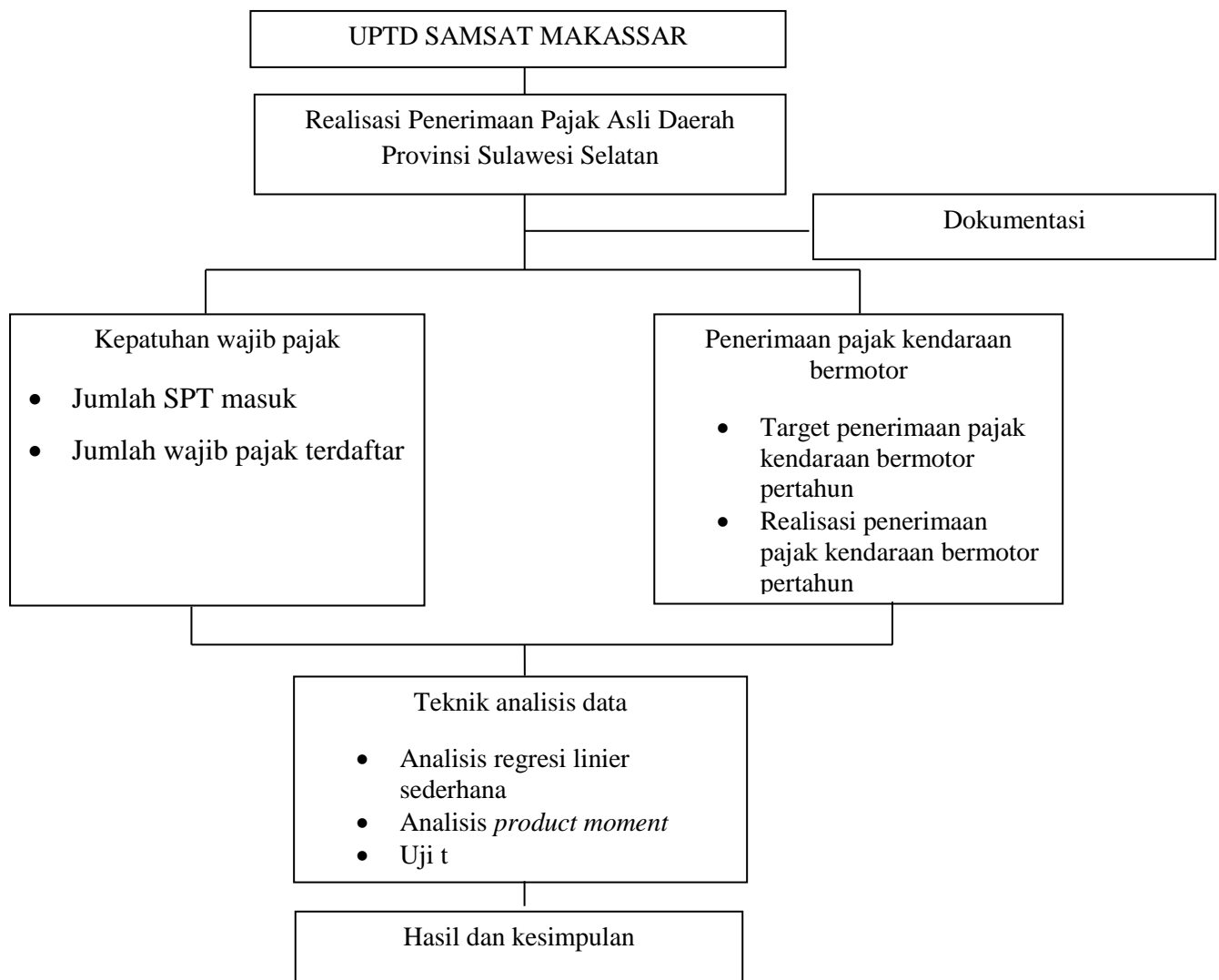
1. Variable Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu objek yang menjadi titik pusat perhatian dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini menjadi variabel adalah sebagai berikut :

- a. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang disimbolkan sebagai dengan X.
- b. Penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel terikat (*dependent variable*) yang disimbolkan dengan Y

2. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh dari UPTD SAMSAT MAKASSAR. Data variabel dependen adalah data Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2016 yang diukur dengan realisasi pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan target pajak kendaraan bermotor sedangkan data variabel independen adalah data kepatuhan yang diukur dengan jumlah SPT yang masuk dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier sederhana dan uji hipotesis melalui uji t. Untuk lebih jelasnya, maka skema penelitian dapat dilihat pada gambar halaman berikut :



Gambar 2. Skema Penelitian

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel terikat yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor. Definisi operasional masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun pengukuran tingkat kepatuhan berdasarkan surat Edaran Dirjen Pajak SE-18/PJ/2006 tanggal 27 juli 2006 tentang *Key Performance Indicator* menyebutkan bahwa salah satu indikator kinerja dari kantor pajak adalah penyampaian SPT untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan rumus adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat kepatuhan : } \frac{\text{jumlah SPT masuk}}{\text{jumlah wajib pajak terdaftar}} \times 100\%$$

Nilai tingkat kepatuhan dikategorikan sebagai berikut :

- tinggi : > 80%
- Cukup tinggi : 61%-80%
- Rendah : <60%

2. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/ atau barang dijalan umum. Penerimaan pajak kendaraan bermotor diukur dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan target pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Makassar.

Adapun rumus rasio efektivitas menurut Mahmudi (2016:142) sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan PKB} = \frac{\text{Realisasi pajak kendaraan bermotor}}{\text{Target pajak kendaraan bermotor}} \times 100\%$$

Keterangan:

Realisasi =

pencapaian suatu rencana

Target = sasaran

tahun. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh 14 kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

D. Teknik Analisis Data

1. Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Menurut (Sugiyono, 2012:257) rumus yang digunakan dalam rumus regresi linear sederhana yaitu :

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (penerimaan pajak kendaraan bermotor)

X = Variabel bebas (kepatuhan wajib pajak)

a = konstanta

b = koefisien korelasi

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka digunakan aplikasi program Statistical *Product Standar Solution* (SPSS) Versi 20.

2. Uji Korelasi *Product Moment*

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan kedua variabel antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Menurut Sugiyono (2014:278) rumus yang digunakan dengan uji korelasi *product moment*, yaitu :

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

n = jumlah responden

x = skor variabel (kepatuhan wajib pajak)

y = skor total dari variabel untuk responden ke-n (penerimaan pajak kendaraan bermotor)

Sedangkan untuk melihat hasil dari nilai korelasi yang diperoleh apakah kuat atau lemah melalui tabel berikut:

Tabel 2. Kriteria interpretasi korelasi menurut aturan yang konservatif

No	Rentang nilai r	Interpretasi
1	0,00-0,19	Sangat rendah
2	0,20-0,39	Rendah
3	0,40-0,59	Sedang
4	0,60-0,79	Kuat
5	0,80-1,00	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2014:231)

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka digunakan aplikasi program *statistical product standar solution* (SPSS) versi 20.

b. Uji-t (uji parsial)

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2014:279) rumus yang digunakan dengan uji-t yaitu :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Uji perbandingan (nilai t yang dihitung)

n = Jumlah periode tahun

r = Nilai koefisien korelasi

Adapun kriteria pengujian hipotesis menurut Sugiyono (2014:279) sebagai berikut :

1. Ha : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Ho : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Apabila t value < 0,05 atau $\alpha = 5\%$ maka Ha diterima dan Ho ditolak.

Ini berarti kepatuhan wajib pajak, berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

4. Apabila t value > 0,05 atau $\alpha = 5\%$, maka Ha ditolak dan Ho diterima.

Ini berarti kepatuhan wajib pajak, tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

HASIL

A. Gambaran Umum Samsat

1. Sejarah Singkat Samsat Makassar

Samsat Makassar merupakan salah satu unit pelayanan teknis daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri sejak tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi Kantor bersama Samsat di Indonesia berdasarkan keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol.Kep. 1693/MK/1976 dan Nomor 311 tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Daerah Kepolisian, dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan daerah khusus mengenai pajak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan Samsat oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dalam penertiban STNK terkait dengan pembayaran PKB dan BBNKB serta SWDKLLJ yang dilaksanakan terpusat di Makassar, dimulai pada tanggal 16 oktober 1978. Samsat Wilayah I Makassar telah memiliki kantor pelayanan sebanyak dua unit masing-masing terletak di jalan Andi Mappanyukki dan AP Pettarani sehingga pelayanan kepada wajib pajak di daerah ini semakin meningkat, kemudian didirikan Kantor Samsat pembantu sebanyak delapan unit se Sulawesi Selatan. Didirikan lima belas cabang Kantor Samsat untuk melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tersebar di dua puluh tiga daerah tingkat II Kabupaten/Kota Madya.

Pada Tahun 2009 Nomor 141 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) merupakan unit operasional dinas pendapatan dan pengelola asset daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada disetiap kabupaten/kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani pemungutan pajak daerah juga melayani pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian pada Tahun 2011 muncul peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak progresif. Maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif di Sulawesi Selatan adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan pertimbangan azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, di mana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang presentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

2. Visi dan Misi Samsat Makassar

Adapun visi dari Samsat yaitu “terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat”. Sedangkan misinya yaitu :

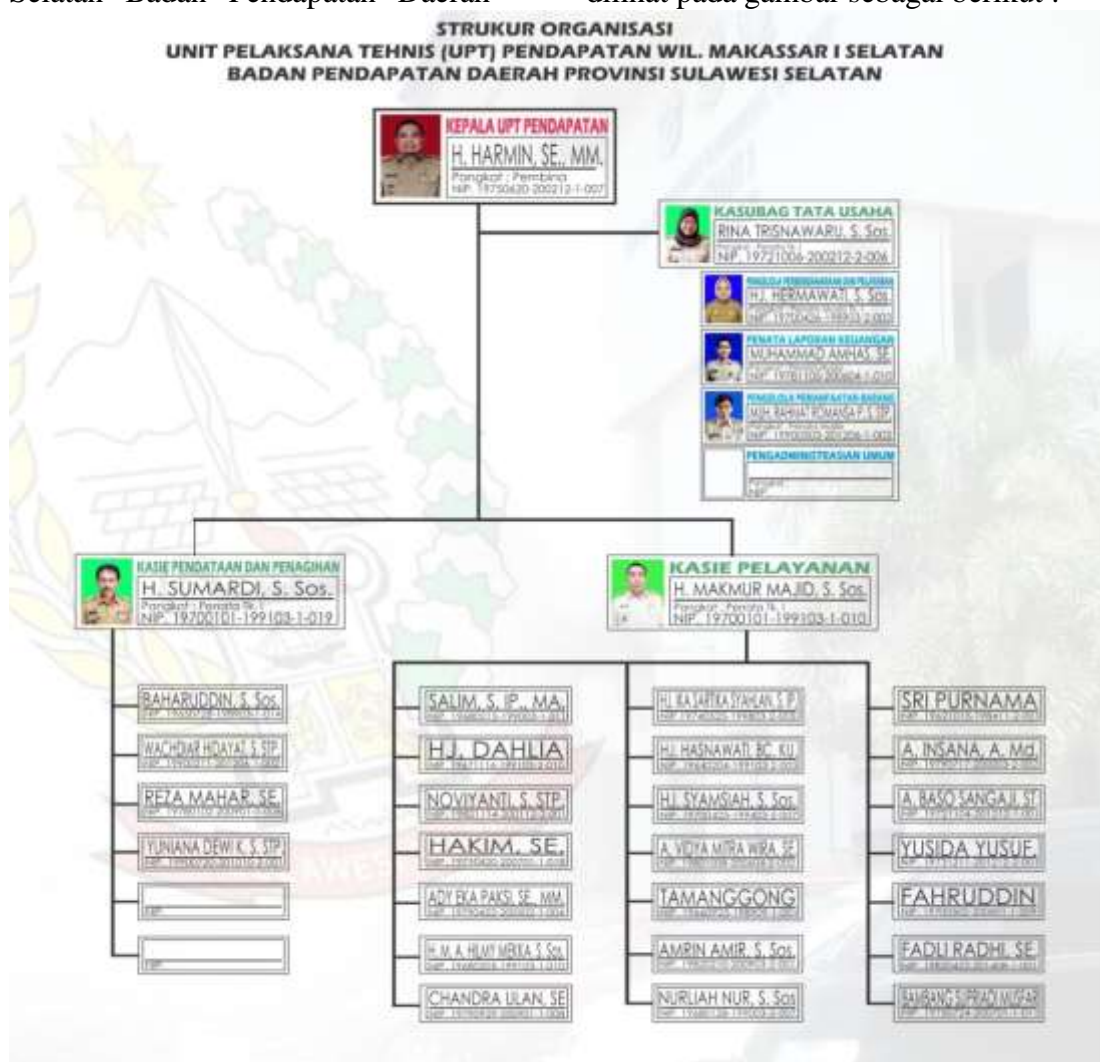
- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi.
- b. Melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat.
- c. Mewujudkan aparat pelaksana SAMSAT yang bersih, jujur, dan cakap, bertanggung jawab dan profesional.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

- e. Penetapan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumen.

3. Struktur organisasi Samsat Makassar

Struktur organisasi unit pelaksana teknis (UPT) pendapatan wil. Makassar 1 Selatan Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kepala UPT pendapatan kemudian dibawah oleh kasubag tata usaha dan dibantu oleh pengelola perbendaharaan dan pelayanan, penata laporan keuangan, dan pengelola pemanfaatan barang pengadministrasian umum. Kemudian dibawah kasie pendapatan dan penagihan, dan dibawah kasie pelayanan. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat dilihat bahwa struktur organisasi pada kantor Samsat Makassar terdiri dari:

- a. Kepala UPTD Samsat Makassar

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas

pokoknya, kepala UPTD mempunyai 6 fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengordinasian pelaksanaan kegiatan
- 2) Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- 3) Pengelolaan pendapatan.
- 4) Pengordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data.
- 5) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang usahanya.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada dinas pendapatan daerah serta penyusunan laporan. Kepala Sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan tatausaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- 3) Melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga.
- 4) Melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD.
- 5) Melaksanakan penatausahaan keuangan.
- 6) Melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran.

c. Kepala Kasie Pendapatan dan Penagihan

Melaksanakan sebagian tugas UPTD didalam bidang pendapatan dan penagihan. Yang dimaksud dalam tugas pokok seksi pendapatan dan penagihan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penagihan dan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.
- 2) Menyiapkan surat penagihan dan surat tegur terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- 3) Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan pendapatan setiap bulannya.
- 4) Melaksanakan tugas operasional pemeriksaan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan (BBN KB) di jalan raya bekeja sama dengan instansi terikat.

B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Variabel

Gambaran umum mengenai data kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005:148) “Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Gambaran umum data kepatuhan wajib pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kantor Samsat Makassar pada Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 3 halaman30:

Tabel 3. Data kepatuhan wajib pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan kantor Samsat Makassar pada tahun 2014-2016

Kepatuhan wajib pajak												
Kabupaten	2014				2015				2016			
	WPYT	WPYM	Tingkat kepatuhan	kat	WPYT	WPYM	Tingkat kepatuhan	kat	WPYT	WPYM	Tingkat kepatuhan	kat
Bulukumba	66.001	53.952	81,7%	T	87.738	66.001	75,2%	CT	94.318	69.385	73,6%	CT
Gowa	156.291	128.917	82,5%	T	244.064	124.302	50,9%	R	264.912	120.177	45,4%	R
Bone	111.371	109.832	98,6%	T	172.463	112.885	65,5%	CT	184.981	118.380	64,0%	CT
Luwu	58.293	43.064	73,9%	CT	96.780	43.362	44,8%	R	103.816	43.010	41,4%	R
Barru	25.588	22.892	89,5%	T	37.828	28.309	74,8%	CT	41.732	30.252	72,5%	CT
Maros	74.168	65.319	88,1%	T	117.238	68.443	58,4%	R	127.433	68.330	53,6%	R
Sinjai	41.574	26.452	63,6%	CT	43.270	42.973	99,3	T	46.651	41.930	89,9%	T
Wajo	81.185	78.972	97,3%	T	127.147	84.652	66,6%	CT	136.939	88.570	64,7%	CT
Bantaeng	20.362	16.393	80,5%	T	26.506	22.449	84,7%	T	28.562	23.559	82,5%	T
Jeneponto	21.704	21.693	99,9%	T	35.385	24.030	67,9%	CT	39.603	26.815	67,7%	CT
Takalar	47.652	39.942	83,8%	T	74.875	42.085	56,2%	R	81.447	43.141	53,0%	R
Pinrang	93.693	71.226	76,0%	CT	147.351	77.176	52,4%	R	157.983	80.326	50,8%	R
Sidrap	67.256	65.753	97,8%	T	107.762	68.403	63,5%	CT	117.451	69.400	59,1%	R
Enrekang	25.022	22.701	90,7%	T	34.492	28.279	82,0%	T	38.321	29.170	76,1%	CT

Sumber : SAMSAT Kota Makassar (data diolah)

Keterangan :

WPYT : Wajib Pajak yang Membayar

WPYT : Wajib Pajak yang Terdaftar

Kat : Kategori

T : Tinggi

CT : Cukup Tinggi

R : Rendah

Berdasarkan tabel 3, pada tahun 2014 dapat diketahui bahwa dari empat belas Kabupaten, terdapat sebelas Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya dalam kategori tinggi, yaitu Kabupaten Bulukumba, Gowa, Bone, Barru, Maros, Wajo, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Sidrap dan Enrekang dengan capaian tingkat kepatuhan wajib pajak mulai dari 80,5 persen sampai dengan 98,6 persen. Tiga Kabupaten dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya dalam kategori cukup tinggi yaitu Kabupaten Luwu, Sinjai, dan Pinrang dengan capaian tingkat kepatuhan wajib pajak mulai dari 63,6 persen sampai dengan 76 persen.

Pada tahun 2015 terdapat 1 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sinjai dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 63,6 persen menjadi 99,3 persen atau dari kategori cukup tinggi menjadi kategori tinggi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang membayar lebih besar dibandingkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Sebelas Kabupaten dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan dari tahun 2014, yaitu Kabupaten Bulukumba dengan penurunan sebesar 7 persen, Kabupaten Gowa dengan penurunan sebesar 38 persen, Kabupaten Bone dengan penurunan sebesar 33 persen, Kabupaten Luwu dengan penurunan sebesar 39 persen, Kabupaten Barru dengan tingkat penurunan sebesar 16 persen, Kabupaten Maros dengan tingkat penurunan sebesar 34 persen, Kabupaten Wajo tingkat dengan penurunan sebesar 31 persen,

Kabupaten Jeneponto dengan tingkat penurunan sebesar 32 persen, Kabupaten Takalar dengan tingkat penurunan sebesar 33 persen, Kabupaten Pinrang dengan tingkat penurunan sebesar 31 persen, dan Kabupaten Sidrap dengan tingkat penurunan sebesar 35 persen. Meskipun Kabupaten tersebut mengalami penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak, tetapi ada enam Kabupaten masih tetap dalam kategori cukup tinggi yaitu Kabupaten Bulukumba, Bone, Barru, Wajo, Jeneponto, Sidrap dan lima kabupaten dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Gowa, Luwu, Maros, Takalar dan Pinrang. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang terdaftar lebih besar dibandingkan wajib pajak yang membayar.

Pada tahun 2016, terdapat dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan dari tahun 2015 masing-masing sebesar 7 persen dan 8 persen, meskipun Kabupaten tersebut mengalami penurunan tetapi ada satu kabupaten masih tetap dalam kategori cukup tinggi yaitu Kabupaten Enrekang dan 1 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sidrap dalam kategori Rendah. Hal ini disebabkan karena peningkatan wajib pajak yang terdaftar lebih besar dibandingkan wajib pajak yang membayar.

Berdasarkan data kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2014-2016, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya yaitu mengalami fluktuatif atau tidak stabil.

b. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Sugianto (2007:36)

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan definisi tersebut, yang

dimaksud dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah jumlah keseluruhan penerimaan pajak yang disetor oleh pemilik kendaraan bermotor pada periode 2014-2016, adapun gambaran umum data penerimaan pajak kendaraan bermotor daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Kantor Samsat Makassar dapat dilihat pada tabel 4 halaman 34:

Tabel 4. Data penerimaan pajak kendaraan bermotor daerah provinsi Sulawesi Selatan pada kantor Samsat Makassar pada tahun 2014-2016

Penerimaan pajak kendaraan bermotor												
2014					2015				2016			
Kabupaten	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Kat	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Kat	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Kat
Bulukumba	23,069,682,700	20,826,891,000	110.8%	SE	25,922,331,625	25,091,230,000	103.3%	SE	29,184,091,203	27,968,690,000	104.3%	SE
Gowa	56,221,237,600	54,120,894,000	103.9%	SE	56,221,237,600	54,120,894,000	103.9%	SE	62,642,474,176	61,609,790,000	101.7%	SE
Bone	36,762,465,710	36,407,592,000	101.0%	SE	41,437,599,750	40,216,170,000	103.0%	SE	47,982,099,692	45,688,700,000	105.0%	SE
Luwu	13,345,090,300	12,250,454,000	108.9%	SE	15,084,674,250	15,557,180,000	97.0%	CE	16,915,236,235	16,801,700,000	100.7%	SE
Barru	9,724,736,190	9,362,144,000	103.9%	SE	11,568,682,683	11,093,390,000	104.3%	SE	13,491,226,733	13,050,500,000	103.4%	SE
Maros	27,479,184,496	27,301,375,000	100.7%	SE	31,737,050,239	30,889,620,000	102.7%	SE	34,537,129,231	33,922,080,000	101.8%	SE
Sinjai	11,903,690,200	10,980,482,000	108.4%	SE	13,489,465,630	12,707,160,000	106.2%	SE	14,701,927,225	14,177,200,000	103.7%	SE
Wajo	29,782,367,680	28,476,615,000	104.6%	SE	33,997,920,435	32,395,570,000	104.9%	SE	39,991,044,985	37,866,650,000	105.6%	SE
Bantaeng	7,543,347,250	6,963,882,000	108.3%	SE	8,884,788,251	8,563,590,000	103.8%	SE	10,337,515,100	9,963,150,000	103.8%	SE
Jeneponto	8,915,528,500	7,897,426,000	112.9%	SE	10,673,547,600	10,376,775,000	102.9%	SE	13,739,953,253	13,477,500,000	101.9%	SE
Takalar	13,788,294,152	14,311,859,000	96.3%	CE	15,870,360,970	15,600,695,000	101.7%	SE	18,198,767,320	17,788,940,000	102.3%	SE
Pinrang	25,093,527,950	24,399,007,000	102.8%	SE	30,010,616,285	29,162,860,000	102.9%	SE	34,215,182,228	33,340,050,000	102.6%	SE
Sidrap	28,536,238,400	27,645,339,000	103.2%	SE	32,781,239,668	31,449,060,000	104.2%	SE	37,418,530,223	36,621,100,000	102.2%	SE
Enrekang	8,363,187,700	7,552,242,000	110.7%	SE	10,315,143,690	10,212,650,000	101.0%	SE	11,619,110,264	11,560,100,000	100.5%	SE

Sumber : SAMSAT Kota Makassar (data diolah)

Keterangan :

Kat : Kategori

SE : Sangat Efektif

CE : Cukup Efektif

Berdasarkan tabel 4, pada tahun 2014 dapat diketahui bahwa dari empat belas Kabupaten, terdapat tiga belas Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam kategori sangat efektif yaitu Kabupaten Bulukumba, Gowa, Bone, Luwu, Barru, Maros, Sinjai, Wajo, Bantaeng, Jeneponto, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang dengan capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor mulai dari 100,7 persen sampai dengan 112,9 persen. Satu Kabupaten, yaitu kabupaten Takalar dengan capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam kategori cukup efektif dengan capaian 96,3 persen.

Pada tahun 2015, terdapat satu Kabupaten yaitu Kabupaten Takalar dengan capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 96,3 persen menjadi 101,7 persen atau dari kategori cukup efektif menjadi kategori sangat efektif atau. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih besar dibandingkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Terdapat satu kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 10 persen, meskipun Kabupaten tersebut mengalami penurunan, tetapi masih tetap dalam kategori cukup efektif, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak lebih kecil dibandingkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pada tahun 2016, terdapat satu kabupaten yaitu Kabupaten

Luwu dengan capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 97 persen menjadi 100,7 persen atau dari kategori cukup efektif menjadi kategori sangat efektif, Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih besar dibandingkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014-2016, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

2. Analisis Statistik Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis statistika. Perhitungan atau analisis yang dilakukan menggunakan bantuan program berbasis computer *SPSS21 for windows*. Adapun data yang dianalisis adalah kepatuhan wajib pajak (X) dan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y), data yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran 1.

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Makassar. Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana dengan menggunakan *SPSS 21 for windows* diperoleh hasil pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	293.214	4.873		60.176	.000
1 Kepatuhan_WP	.077	.020	.737	3.777	.003

a. Dependent Variable: Penerimaan_PKB

Sumber : Data Primer, SPSS 21 (data diolah)

Berdasarkan *output* SPSS pada tabel 5 diperoleh model persamaan sebagai berikut :

$$Y = 293,214 + 0,077X$$

Dari model persamaan yang diperoleh, diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 293,214, artinya jika variabel kepatuhan wajib pajak sama dengan 0, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Makassar sebesar 293,214.

Nilai koefisien sebesar 0,077, hal ini berarti bahwa jika variabel kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Makassar akan meningkat sebesar 0,077 satuan.

b. Analisis Korelasi *Product Moment*

Analisis Korelasi *Product Moment* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Makassar. Hasil analisis Korelasi *Product Moment* dengan menggunakan SPSS 21 for windows dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Hasil Analisis Korelasi *Product Moment*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.505	3.76204

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan_WP

b. Dependent Variable: Penerimaan_PKB

Sumber : Data Primer, SPSS 21 (data diolah)

Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai korelasi *product moment* (r) sebesar 0,737 berarti bahwa antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat

Makassar berada pada interval 0,60–0,79 yang berarti termasuk dalam kategori kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak kendaraan

bermotor pada kantor Samsat Makassar berarah positif.

C. Uji-t

Uji-t digunakan untuk mengetahui berpengaruh signifikan atau tidak variabel kepatuhan wajib pajak terhadap variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar. Hasil uji-t menggunakan *SPSS 21 for windows* dapat dilihat pada tabel 5 pada halaman 45:

Berdasarkan tabel 5, dapat dijelaskan bahwa dari hasil Uji-t diperoleh hasil t hitung sebesar 3,777 dengan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Hal ini berarti variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima, karena kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data yang diperoleh model persamaan hasil persamaan regresi $Y = 293,214 + 0,077X$ dengan koefisien regresi $X = 0,077$ yang menyatakan setiap penambahan 1 nilai kepatuhan wajib pajak maka

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT (Sistem Manunggal Satu Atap) Makassar bertambah sebesar 0,077. Korelasi *product moment* diperoleh nilai (r) sebesar 0,737 yang berada pada interval 0,60–0,79 pada kategori kuat, artinya terdapat pengaruh signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar. Hasil uji-t diperoleh hasil t hitung sebesar 3,777 dengan signifikan sebesar 0,003. hasil ini menunjukkan nilai signifikannya yang lebih kecil dari 5 persen ($\alpha = 0,05$) ini berarti variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT (Sistem Manunggal Satu Atap) Makassar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Priantara (2012:109) bahwa “peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak”, pendapat ini didasarkan atas pandangan bahwa jika tingkat kepatuhan tinggi maka penerimaan pajak juga tinggi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yeni (2013) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis regresi linear sederhana kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar.
2. Berdasarkan uji korelasi *product moment* kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan kuat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, artinya terdapat pengaruh yang signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar.
3. Berdasarkan hasil uji-t kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar. Sehingga dapat dikatakan hipotesis diterima bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar

SARAN

Setelah melakukan penelitian di kantor Samsat Makassar dan memperoleh hasil yang memuaskan, namun beberapa hal tertentu di pandang perlu untuk diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya sosialisasi ataupun edukasi pajak terhadap wajib pajak secara rutin dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor seperti kesadaran wajib pajak, sangsi denda, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut Hilarius. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Diadit Media
- Aditya. 2008. *Pajak Daerah dan Retribus Daerah*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Damayanti Woro Theresia, Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Priantara Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta :Penerbit Mitra Wacana
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:Unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Nurmantu Safri. 2005. *Pengantar*

Perpajakan. Jakarta: Granit

Rosdiana Haula, Irianto Slamet Edi.
2012. *Pengantar Ilmu Pajak*.
Jakarta: PTRajaGrafindo Persada

Samudra Azis Azhari. 2015.
Perpajakan di Indonesia.
Jakarta: PT.RajaGrafindo

Setyawan Setu, Suprpti Eny. 2004.
Perpajakan. Malang: Bayumedia
publishing dan UMM press

Suandy Erly. 2009. *Hukum pajak*.
Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.
Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.
Bandung: Alfabeta

Sugianto. 2007. *Pajak dan Retribusi
Daerah*. Jakarta: Cikal Sakti

Supramono, Damayanti Woro
Theresia. 2005. *Perpajakan
Indonesia*. Yogyakarta: Andi

Sumber Lain :

Alfian Rahmat. 2014. *Pengaruh
kepatuhan wajib pajak orang
prbadi terhadap penerimaan
pajak di KPP Pratama Surabaya
Krembangan*

Indrisari. 2015. *Pengaruh kepatuhan
wajib pajak dan penagihan
dengan surat paksa terhadap
penerimaan pajak kantor
pelayanan pajak KPP Pratama
Garut*

Keputusan Menteri Keuangan
No.544/KMK.04/2000

Lebukan Yosefa. 2011. *Pengaruh
tingkat kepatuhan wajib pajak
PPh 21 terhadap penerimaan
pajak penghasilan pasal 21 pada
kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Utara*

Surat Edara Dirjen Pajak SE-
18/PJ/2006 tanggal 27 juli 2006
tentang *Key Performance
Indicator*

Yeni Rahma. 2103. *Pengaruh tingkat
kepatuhan wajib pajak badan
terhadap peningkatan penerimaan
pajak yang dimoderasi oleh
pemeriksaan pajak pada KPP
Pratama Padang*